

# **EVALUASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2021**

Agustin Mellyana Setiani  
**Departemen Politik dan Pemerintahan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **Abstrak**

Meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Blora menjadi latar belakang dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui berhasil atau tidaknya keberlangsungan implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mengevaluasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi dari William Dunn yang terdapat 6 (enam) aspek/indikator seperti efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan/perataan, responsivitas, dan ketepatan. Selain itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mengumpulkan data melalui wawancara bersama narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, serta didukung oleh studi pustaka dari dokumen-dokumen yang terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora telah mengupayakan pengentasan kemiskinan dengan membuat kebijakan Peraturan Bupati serta hasil dari implementasi program dan kegiatannya menghasilkan capaian yang cukup bagus, meskipun masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum dijalankan secara efektif bahkan masih ada yang belum dilaksanakan. Selain itu, ditemukan bahwa kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Blora disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang membuat banyak masyarakat terdampak dengan kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan pendapatan/penghasilan sehari-hari menurun, serta tidak terpenuhinya kebutuhan perekonomian karena harga kebutuhan pokok mengalami peningkatan.

**Kata Kunci : Kemiskinan, Evaluasi, Kabupaten Blora**

## EVALUATION OF ACCELERATION OF POVERTY REDUCTION IN BLORA REGENCY IN 2021

Agustin Mellyana Setiani  
**Departemen Politik dan Pemerintahan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### *Abstract*

*The increasing poverty rate in Blora Regency is the background of this research. The purpose of this study is to determine the success and sustainability of the implementation of accelerated poverty reduction to evaluate the acceleration of poverty reduction in Blora Regency.*

*This research was conducted using the evaluation theory of William Dunn, which contained 6 (six) aspects/indicators such as effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. In addition, this study uses a descriptive qualitative method which collects data through interviews with resource persons related to this research, and is supported by a literature study of related documents.*

*The results of this study indicate that the Blora Regency Government has sought poverty alleviation by making a Regent's Regulation policy and the results of the implementation of its programs and activities have produced quite good results, although there are still several programs and activities that have not been carried out effectively and some have not been implemented. In addition, it was found that the increase in the poverty rate in Blora Regency was caused by the Covid-19 pandemic which made many people affected by losing their jobs which resulted in decreased daily income/income, and the unfulfilled economic needs because the prices of basic necessities increased.*

***Keywords: Poverty, Evaluation, Blora Regency***

## **A. PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan persoalan utama yang harus dihadapi oleh negara Indonesia, tak terkecuali Kabupaten Blora. Berdasarkan data dari tahun 2010-2015 Angka kemiskinan di Kabupaten Blora secara perlahan mengalami kemajuan karena perkembangan persentase serta jumlah dari penduduk miskin selama 5 tahun tersebut mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Menindaklanjuti dengan adanya penurunan angka kemiskinan ditahun 2010-2015. Pemerintah Kabupaten Blora ikut serta pada kebijakan Presiden terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, dengan membentuk serta mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blora. Dilakukannya percepatan dalam penanggulangan kemiskinan dengan membentuk Peraturan Bupati Blora yaitu sebagai urgensi untuk melakukan

penanggulangan kemiskinan agar angka kemiskinan di Blora tidak mengalami kenaikan setelah beberapa tahun perkembangannya menurun. Selain itu, kebijakan ini diperlukan agar implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan berjalan secara terencana dan sistematis dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan. Peraturan Bupati Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ini tidak hanya dibuat untuk sekedar nama regulasi atau peraturan saja, melainkan diimplementasikan berbagai program dan kegiatannya serta setelahnya dilakukan pengevaluasian untuk mengetahui keberhasilan dari implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora.

Selama implementasi dari percepatan penanggulangan kemiskinan, dapat dikatakan bahwasannya sejak tahun 2015 dari adanya Peraturan Bupati Blora Nomor 33 Tahun 2015, kondisi kemiskinan di Kabupaten Blora bertahun-tahun berangsur menurun dan mempertahankan peringkat yang sama pada tahun 2015 hingga 2019. Namun

penurunan kemiskinan tersebut tidak berlangsung pada tahun 2020, dikarenakan kemiskinan di tahun tersebut mengalami kenaikan dan menjadikan peringkat kemiskinan Kabupaten Bloro mengalami perubahan yang cukup signifikan menjadi peringkat ke-23 se Jawa Tengah, yang mana pada tahun sebelumnya dari tahun 2015 Kabupaten Bloro menduduki posisi peringkat 21 se Jawa Tengah. Dari hal tersebut perlunya mengevaluasi adanya implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan yang didasarkan dan berpedoman atas Peraturan Bupati Bloro Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, agar implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut dapat berjalan secara efektif di tahun-tahun berikutnya guna membantu mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bloro.

Adapun latar belakang tersebut membuat penulis memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi dan hasil percepatan penanggulangan

kemiskinan di Kabupaten Bloro tahun 2016-2020 dan bagaimana evaluasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bloro tahun 2021.

## **B. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan fokus permasalahan yang diuraikan tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui keberhasilan dan keberlangsungan dari implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mengevaluasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bloro.

## **C. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS**

### **1. Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi merupakan suatu tahapan yang penting dalam kebijakan publik untuk mengetahui berlanjut atau tidaknya suatu kebijakan. Keberlanjutan dari kebijakan dapat dilihat dari hasil evaluasi, maka dari itu dalam mengevaluasi kebijakan harus dilakukan secara serius berdasarkan ukuran-ukuran atau ketentuan yang sudah ditetapkan.

Evaluasi memiliki beberapa definisi dari beberapa ahli diantaranya menurut

Aderson dalam (Akbar & Widya, 2018), yakni evaluasi sebagai sebuah proses untuk menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya suatu tujuan. Selain itu, evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberikan nilai dengan obyektif terkait dengan pencapaian hasil yang sudah ditetapkan bahkan direncanakan sebelumnya (Abdoellah & Yudi, 2016). Tujuan adanya evaluasi kebijakan yaitu untuk mengetahui apakah kebijakan layak untuk dilanjutkan atau tidak, selain itu dapat menjadi tolak ukur dalam membuat kebijakan yang tepat, serta untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan public dapat dipertanggungjawabkan dan sejauh mana tujuan dapat dicapai, menurut Rian dalam (Yunus, 2014).

Keberhasilan dan kegagalan dari suatu kebijakan dapat dinilai dari beberapa kriteria evaluasi yang telah dikembangkan. Hal ini contohnya seperti indikator yang dikembangkan oleh William Dunn, yang mana terdapat 6 (enam) kriteria atau aspek yang digunakan penulis dalam mengevaluasi

kebijakan, yang mencakup sebagai berikut:

KRITERIA	PERTANYAAN
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Sumber: William Dunn, (1990:610), terj.

## 2. KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang cukup serius bagi keberlangsungan kehidupan manusia, maka dari itu untuk mengangkat manusia dari masalah kemiskinan diperlukan berbagai cara untuk mengatasinya. Sebelum mengatasi masalah kemiskinan, perlu adanya kebijaksanaan yang tepat yaitu dengan mengidentifikasi golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, karena pada umumnya suatu keadaan disebut miskin dapat ditandai dengan adanya kekurangan atau tidak

mampu memenuhi tingkat kebutuhan dasar (Kadji, 2013). Terdapat beberapa golongan tipe kemiskinan yaitu:

- a. Kemiskinan persistem yaitu suatu situasi dimana orang atau keluarga secara konsisten tetap miskin untuk masa yang relatif lama. Menurut Berrick dalam (Pratama, 2014), tipe ini adalah mereka yang mempunyai tunjangan kesejahteraan selama kurang lebih dari 8 tahun.
- b. kemiskinan transien yaitu suatu situasi dimana kehidupan orang atau keluarga secara temporer dapat jatuh di bawah garis kemiskinan bila terjadi adanya PHK, jatuh sakit dan peningkatan biaya pendidikan, menurut Pandji Indra dalam (Pratama, 2014).

### **3. PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik secara ekonomi maupun kemanusiaan untuk mengangkat seorang individu atau keluarga keluar dari zona kemiskinan secara permanen. Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora dilakukan dengan

menggunakan pendekatan secara top-down melalui kebijakan Peraturan Bupati. Konsep pendekatan top-down ini yaitu perencanaan terkait penanggulangan kemiskinan dengan segala keputusan hingga jenis program dan kegiatannya ditentukan oleh pemerintah.

#### **D. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau seringkali disebut dengan metode kualitatif deskriptif yang melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, menganalisis data dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data. Selain itu bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan, menganalisa terkait evaluasi implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara langsung dan juga studi kepustakaan.

#### **E. HASIL PENELITIAN**

**Implementasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan**

Guna mengentas kemiskinan di Kabupaten Blora, Pemerintah Kabupaten menetapkan dan mengesahkan regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati. Regulasi tersebut yaitu Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blora

### **1. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah**

Implementasi dari percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah Kabupaten, yang mana anggotanya berasal dari berbagai dinas/instansi yang berada di Kabupaten Blora. Dapat diketahui bahwasannya salah satu inovasi dari percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora yaitu dengan adanya pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan tingkat kecamatan dan

tingkat desa/kelurahan, yang mempunyai dan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Blora melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan dengan cara terpadu yang mana melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibagi dalam sekretariat dan sejumlah kelompok kerja yang memiliki tugas masing-masing.

- a. Sekretariat yang memiliki tugas untuk memberi dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan
- b. Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dari Sekretaris Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Blora untuk mengelola data dan sistem informasi terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan
- c. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan yang memiliki tugas memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan

- d. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat yang mempunyai tugas memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat
- e. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten untuk melaksanakan koordinasi di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga
- f. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas melakukan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat
- g. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil yang mempunyai tugas melakukan koordinasi di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Blora anggotanya bersifat

multisektor karena melibatkan banyak lembaga atau perangkat daerah Kabupaten Blora untuk memaksimalkan implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan.

## **2. Strategi Kebijakan dan Kelompok Sasaran Penanggulangan Kemiskinan**

Percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora memiliki strategi kebijakan dan kelompok sasaran untuk menanggulangi kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin secara adil dan merata. Pemerintah Kabupaten Blora membuat strategi kebijakan agar dalam implementasi penanggulangan kemiskinan idapat berjalan sesuai dengan harapan dan tepat sasaran. Guna mempercepat menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Blora menetapkan strategi diantaranya:

1. Memperkuat kinerja kelembagaan dengan menetapkan kebijakan yang pro terhadap kemiskinan.
2. Peningkatan kapasitas dan pembinaan pelaku industri kecil, pemberdayaan UKM, pengembangan kualitas produk beserta pemasaran untuk



- meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas pelatihan/magang bagi pencari kerja dengan mengembangkan ram kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industry idalam penempatan kerja.
  4. Meningkatkan penanganan PMKS melalui iketerampilan dalam mendukung adanya peningkatan pendapatan.
  5. Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan pendidikan melalui penurunan beban biaya serta perluasan akses layanan pendidikan.
  6. Meningkatkan pemerataan, akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui perluasan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
  7. Meningkatkan kecukupan gizi masyarakat melalui pemenuhan pangan yang bergizi dan seimbang bagi balita iyang terdeteksi berpotensi gizi buruk maupun gizi kurang.
  8. Menurunkan angka kesakitan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan gerakan bebas jentik 95% serta peningkatan jangkauan temuan TB pada 100 meter kasus positif yang ditemui.
  9. Meningkatkan ipemenuhan sarana dan prasarana dasar melalui penyediaan rumah, rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan sanitasi, dan pengembangan jaringan air bersih.
  10. Meningkatkan ipembangunan sarana air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat.
- Permasalahan kemiskinan merupakan persoalan sosial yang biasanya dikaitkan dengan adanya ketertinggalan dan keterbelakangan dalam lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, kemiskinan merupakan suatu masalah yang bersifat multidimensional, sehingga untuk mengukur tingkat kemiskinan dibutuhkan cara yang tepat dan sesuai karena pada dasarnya mengukur kemiskinan bukanlah kegiatan yang mudah. Terdapat 2 (dua) jenis data makro dan mikro dari Badan Pusat

Statistik Kabupaten Bloro untuk mengukur tingkat kemiskinan.

Data Makro ialah data diperoleh melalui proses survey (sample) yang bersifat komulatif dengan member profil dan gambaran umum suatu daerah, yang biasanya diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik selama 2 kali satu tahun seperti data tingkat kemiskinan, indeks kedalaman dan data resmi lainnya. Data mikro ialah data diperoleh melalui imekanisme atau proses isensus yang ibersifat idetail. Bentuk nyata dari data kemiskinan mikro tersebut yaitu adanya data Pemutakhiran Basis Data Terpadu tahun 2019 dari hasil verifikasi dan validasi data SIKS-NG yang dilakukan oleh Kemensos RI melalui Dinsos P3A Kabupaten Bloro, kemudian berubah menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang digunakan sebagai basis data kemiskinan di Kabupaten Bloro.

Maka dari itu kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bloro menjadi acuan atau target yang digunakan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan untuk menentukan kelompok sasaran dituju dalam percepatan penanggulangan

kemiskinan serta sesuai dengan strategi kebijakan yang telah ditetapkan.

### **3. Program dan Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan**

Terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bloro, terdapat program percepatan penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bloro. Ruang lingkup program penanggulangan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bloro Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana sudah diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 yaitu terdapat Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga; Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil; dan Program lainnya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membantu perekonomian masyarakat. Dalam implementasi program dan kegiatannya, masih ditemukan adanya kegiatan yang belum dilaksanakan, serta program yang belum dijalankan secara efektif, meskipun capaian dari program

ini membuahkan hasil yang lumayan bagus.

#### 4. Capaian Hasil Kinerja Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016-2020

Hasil kerja keras dari Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bora dapat dilihat dari hasil yang dicapai setiap tahunnya Berikut merupakan kondisi penduduk miskin di Kabupaten Bora Tahun 2016-2020.

**Tabel**  
**Kondisi Penduduk Miskin di Kabupaten Bora Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Tahun (jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	113.900	111.880	102.500	97.860	103.730
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	13,33	13,04	11,90	11,32	11,96
3	Peringkat Kemiskinan Kab. Bora di Jawa Tengah	21	21	21	21	23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bora, 2020.

Kenaikan jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan di Kabupaten Bora disebabkan adanya kondisi 2020 yang mana hampir di semua Negara

dihadapkan dengan adanya Pandemi Covid-19 yang membuat banyak penduduk di Kabupaten Bora kehilangan pekerjaan karena harus di PHK atau pemberhentian pekerjaan sehingga menyebabkan angka pengangguran mengalami peningkatan. Salah satu akibat banyaknya penduduk yang mengalami pemberhentian pekerjaan dengan kata lain mengakibatkan banyak kegiatan usaha yang berhenti total sehingga lapangan pekerjaan dan akses sumber pendapatan masyarakat miskin tertutup. Dalam hal ini, kenaikan penduduk miskin tidak disebabkan oleh gagalnya implementasi program dan kegiatannya, karena capaian yang di hasilkan selama tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang cukup bagus.

#### Evaluasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Penelitian evaluasi implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bora ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dunn yang dipakai sebagai landasan maupun petunjuk dalam penelitian. Berikut ini merupakan evaluasi

implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora yang menggunakan aspek-aspek atau indikator William Dunn, hal tersebut diantaranya:

### 1. EFEKTIVITAS

Menurut Mahmudi dalam (Sartika, 2019), efektivitas merupakan suatu hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Menurut Makmur dalam (Mingkid, Daud, & Lengkong, 2017), terdapat indikator-indikator efektivitas yang dapat dilihat dari segi kriterianya, beberapa diantaranya seperti: Ketepatan dalam Menentukan Tujuan yang merupakan aktivitas dari suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dan Ketepatan Sasaran yang sangat berpengaruh untuk menentukan keberhasilan aktivitas organisasi apabila dalam penentuan sasaran dapat dilakukan secara tepat.

Pemerintah Kabupaten Blora dan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam menjalankan program dan kegiatan kemiskinan belum mencapai

target sasaran yang ditentukan, bahkan beberapa program dan kegiatan diantaranya juga belum dapat terlaksana. Keefektifan dari keberlangsungan implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan ini ketika tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan dapat memberikan *output* (keluaran) yang optimal.

Berdasarkan dari tujuan dan sasaran tersebut, masih terdapat program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang belum diimplementasikan. Program yang belum diimplementasikan diantaranya: Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dalam kegiatan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha; Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil dalam perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin dan peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir.

Selain itu, masih juga ditemukan program dan kegiatan yang belum berjalan secara efektif, diantaranya:

a) Program Bantuan Pangan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga meliputi:

penyediaan subsidi bahan pangan dan pemberian subsidi pupuk; program bantuan perumahan dalam penyediaan rumah; program bantuan kesehatan dalam penurunan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; program bantuan pendidikan dalam peningkatan jumlah kelompok bejalat paket A, B, dan C; program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dalam fasilitasi kemitraan Pemerintahan Daerah dan Swasta

- b) Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil dalam peningkatan permodalan bagi penduduk miskin dan perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin.

Dapat dikatakan bahwa output atau keluaran yang dihasilkan masih belum mencapai tujuan yang hendak dicapai atau diinginkan, meskipun program dan kegiatan sudah dijalankan seefektif mungkin dan realisasi atau hasilnya mengalami peningkatan.

## **2. EFISIENSI**

Menurut Susilo dalam (Syam, 2020), efisiensi adalah suatu keadaan

atau kondisi, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Indikator yang digunakan peneliti untuk mengukur efisiensi dari implementasi percepatan penanggulangan ini yaitu alokasi biaya bantuan percepatan penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan evaluasi dari aspek efisiensi untuk implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan menggunakan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan, namun jumlah anggaran yang terealisasi di setiap dinas/lembaga/instansi maupun Organisasi Perangkat Daerah untuk penanggulangan kemiskinan berbeda dengan jumlah anggaran yang ditetapkan. Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan perlu untuk dipertimbangkan lagi terkait dengan penetapan dana, karena alokasi dana percepatan penanggulangan kemiskinan masih kurang sesuai antara

anggaran yang diberikan dengan anggaran yang terealisasi dan target kinerja yang ditetapkan.

### **3. KECUKUPAN**

Kecukupan memiliki kriteria yang menekankan pada kuatnya suatu hubungan antara alternatif kebijakan dengan hasil yang diharapkan (Mustari, 2015). Kecukupan dalam evaluasi ini untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan tersebut dapat memecahkan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Blora.

Dari banyaknya program dan kegiatan yang ditetapkan dan diimplementasikan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, terdapat beberapa kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang sudah berjalan seperti yang diharapkan. Tetapi disisi lain masih terdapat adanya program dan kegiatan yang belum memenuhi harapan masyarakat miskin seperti Program Bantuan Perumahan dengan adanya kegiatan bantuan perbaikan rumah, yang mana bantuan perbaikan rumah ini anggarannya dan implementasinya masih

di priotaskan pada lokus desa miskin belum mengalami perluasan sasaran.

### **4. PEMERATAAN/PERATAAN**

Menurut (Damanik & AUFARUL, 2016) pemerataan dalam kebijakan publik diartikan sebagai suatu keadilan yang diberikan serta diperoleh dari suatu kebijakan publik. Agar dapat menentukan hasil pemerataan terkait dengan proses evaluasi implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan, diperlukan juga tanggapan atau respon masyarakat miskin untuk melihat apakah implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan ini dapat dirasakan dan diterima oleh warga miskin, serta dapat berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan.

Secara umum program percepatan penanggulangan kemiskinan sudah dilaksanakan secara merata. Sehingga dapat dikatakan, bahwa program implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan sudah dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat miskin, hanya saja masih adanya beberapa bagian masyarakat yang belum menerima program penanggulangan tersebut.

Berdasarkan aspek pemerataan ini, implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan memerlukan peningkatan realisasi program penanggulangan, agar masyarakat miskin dapat menerima setiap program dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Blora secara meluruh. Tidak meratanya penerima bantuan kemiskinan tersebut diantaranya implementasinya lebih banyak difokuskan pada lokus desa miskin saja dan belum mengalami perluasan, serta masih adanya kegiatan yang belum dijalankan, dari hal tersebut masih ditemukannya masyarakat miskin yang belum mendapat kesejahteraannya, padahal apabila Oleh karena itu, jika seluruh masyarakat miskin mendapatkan bantuan secara merata maka kemiskinan di Kabupaten Blora akan mengalami penurunan dengan signifikan serta masyarakat akan mendapatkan kesejahteraannya.

## **5. RESPONSIVITAS**

Menurut Dwiyanto dalam (Afrizal, 2018), responsivitas merupakan suatu kemampuan dalam organisasi untuk mengenali tentang kebutuhan

masyarakat dengan menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Responsivitas ini digunakan untuk mengukur daya tanggap terhadap adanya harapan, keinginan, dan aspirasi serta tuntutan dari masyarakat, serta responsivitas dapat juga dikatakan sebagai respon dari suatu aktivitas (Alamsyah, 2016). Kriteria responsivitas dari penelitian ini yaitu melihat adanya kesesuaian antara program percepatan penanggulangan kemiskinan dengan keinginan masyarakat atau kebutuhan masyarakat (Damanik & AUFARUL, 2016).

Dari segi aspek responsivitas untuk mengevaluasi implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dibuktikan dengan masyarakat yang menerima bantuan merasa sangat terbantu terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Pemerintah Kabupaten Blora. Hal tersebut dikarenakan bantuan-bantuan tersebut sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat miskin serta

dapat mencukupi kebutuhan perekonomian masyarakat miskin.

## **6. KETEPATAN**

Aspek atau indikator ketepatan untuk mengevaluasi suatu pelaksanaan kebijakan difokuskan terkait hasil (tujuan) yang diinginkan yang mana implementasi suatu program dapat benar-benar berguna atau bernilai bagi masyarakat. Menurut (Mustari, 2015) ketepatan (*appropriateness*) adalah tepatnya sasaran atau pemberian program secara tepat.

Dari aspek ketepatan, implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan memberikan dampak yang terbaik untuk masyarakat miskin. Hal itu dibuktikan dengan adanya masyarakat miskin yang sangat menerima dan mensyukuri atas bantuan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Masyarakat secara langsung merasakan dampak positif dari adanya program percepatan penanggulangan kemiskinan yang disalurkan. Tak hanya itu, masyarakat miskin dapat merasakan dan memanfaatkan bantuan tersebut dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah hampir seluruhnya dapat dirasakan oleh masyarakat miskin, meskipun masih perlunya perluasan penerima bantuan supaya bantuan yang diberikan dapat diterima masyarakat secara merata.

## **F. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Implementasi dan hasil percepatan penanggulangan kemiskinan diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dengan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Program percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora yang berdasarkan Peraturan Bupati No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah pada Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015, program dan kegiatannya berhasil diimplementasikan sekitar 85% dari semua program yang ditetapkan. Hasil atau realisasi dari implementasi program dan kegiatan



percepatan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2016-2020 mencapai peningkatan yang cukup bagus, sehingga kenaikan kemiskinan pada tahun 2020 bukan disebabkan karena kurangnya upaya dari Pemerintah Kabupaten dan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, melainkan karena adanya musibah pandemi Covid-19.

2. Dari ke-6 (enam) indikator evaluasi William Dunn, indikator responsivitas dan ketepatan merupakan indikator yang telah terpenuhi di Kabupaten Blora terkait percepatan penanggulangan kemiskinan. Bahwasannya masyarakat miskin memberikan respon positif dan merasakan dampak positif terkait program bantuan dari kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan karena mereka mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan mereka sebab melalui bantuan tersebut mampu membantu meringankan beban perekonomian mereka. Indikator lainnya seperti

efektivitas belum terpenuhi karena masih terdapat program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang belum dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten dan masih adanya program yang belum berjalan efektif dan indikator kecukupan belum memenuhi harapan masyarakat miskin. Selain itu pada indikator efisiensi jumlah alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang masih kurang sesuai antara anggaran yang diberikan dengan anggaran yang terealisasi dan target kinerja yang ditetapkan; serta terkait indikator pemerataan belum dijalankan secara meratanya implementasi program karena bantuan dan kegiatannya masih difokuskan pada lokus desa miskin.

### **Saran**

1. Pemerintah Kabupaten kedepannya dapat menjalankan program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang belum berlangsung menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Pemerintah Kabupaten perlu memprioritaskan semua program penanggulangan kemiskinan supaya program yang kegiatannya dapat berjalan secara efektif.
3. Pemerintah Kabupaten perlu memperluas sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan supaya program bantuan dapat diberikan secara merata tidak hanya difokuskan pada lokus prioritas desa miskin saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Abdoellah, A. Y., & Yudi, R. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Afrizal, A. (2018). Responsivitas Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Pekanbaru Tahun 2015. *JOM Fisip* , 1-10.
- Aidha, C. N., & dkk. (2020). *Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia, 2015-2018*. Jakarta Selatan: Perkumpulan PRAKARSA.
- Akbar, M. F., & Widya, K. M. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Damanik, Y. T., & Aufarul, M. (2016). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pelatihan Keterampilan Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Administrasi Publik* , 1-11.
- Kadji, Y. (2013). Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya. *Ekonomi dan Bisnis* .
- Mingkid, G. J., Daud, L., & Lengkong, J. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Ilmu Pemerintahan* , 1-11.
- Mustari, N. (2015). *PEMAHAMAN KEBIJAKAN PUBLIK Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Pratama, Y. C. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Bisnis dan Manajemen* , 210-223.
- Sartika, D. (2019). Analisis Efektivitas Pendapatan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Ekonomi dan Bisnis* , 11.
- Syam, S. (2020). Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor

Kecamatan Banggae Timur. *Ilmu Manajemen* , 128-152.

Yunus. (2014). *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan (Fungsi-Fungsi Manajemen)*. Majalengka: Unit Penerbitan Universitas Majalengka.

### **Peraturan Perundangan-Undangan**

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015  
Tentang Percepatan Penanggulangan  
Kemiskinan di Kabupaten Blora

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015  
Tentang Perubahan Atas Peraturan  
Bupati Nomor 1 Tahun 2015 Tentang  
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  
di Kabupaten Blora